

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia pada dasarnya tidak bisa lepas dari aktifitas politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap dalam aktifitas politik yang dilakukan oleh manusia tentunya dituntut untuk bisa berpartisipasi dalam mewujudkan suatu tujuan. Namun sering kali kita menemukan bahwa setiap masyarakat yang sebenarnya mempunyai hak dan kewajiban untuk dapat berpartisipasi dalam berpolitik mendapatkan berbagai kendala. Banyak yang menilai bahwa masyarakat dapat berpartisipasi dalam politik pada saat pemilihan. Padahal sejatinya dalam kehidupan berdemokrasi, masyarakat mempunyai hak untuk dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan program-program pemerintah. Mulai dari pemerintah pusat sampai dengan pemerintah Desa.

Pemerintahan Setiap Negara tanpa melihat sistem politik yang dimilikinya tentunya memiliki pandangan dan ruang untuk masyarakatnya dalam partisipasi politik. Partisipasi politik masyarakat tersebut bisa berupa aspirasi yang disampaikan secara audiensi ataupun demonstrasi, bisa dilaksanakan dengan cara langsung ataupun tidak langsung, bisa dilaksanakan dengan cara yang legal maupun illegal, bisa dilaksanakan secara spontan maupun berkesinambungan. Hal ini tentunya meilihat karakteristik yang dimiliki dari setiap masyarakat.

Masyarakat seringkali dijadikan sebagai objek politik dalam momentum pemilihan umum. Padahal sejatinya masyarakat mempunyai hak untuk dapat berpartisipasi dan dapat menunjukkan eksistensinya dalam berbagai program yang

akan dijalankan pemerintah. Sehingga masyarakat tidak hanya dinilai sebagai objek politik saja, namun masyarakat juga bisa menjadi subjek atau pelaku politik. Adanya program pemerintah yang dapat melibatkan masyarakat tentu menjadi nilai plus dalam ranah partisipasi politik masyarakat.

Partisipasi masyarakat dapat diwujudkan melalui partisipasi secara individu maupun kelompok masyarakat. Partisipasi politik ini mempunyai peranan yang penting dalam konteks dinamika perpolitikan di pemerintahan. Dengan adanya partisipasi politik oleh masyarakat, maka kepentingan masyarakat tersebut akan dapat terakomodir dan tersampaikan kepada pemerintah. Begitu juga sebaliknya, jika tidak ada partisipasi masyarakat maka kepentingannya juga tidak akan terakomodir. Sehingga partisipasi masyarakat menjadi faktor yang penting untuk mewujudkan kepentingan masyarakat secara umum.

Partisipasi politik pada dasarnya merupakan bentuk keikutsertaan masyarakat dalam proses atau pelaksanaan aktifitas politik. Beberapa contoh dalam partisipasi politik masyarakat adalah saat adanya program serap aspirasi dari pemerintah atau berpartisipasi pada saat adanya pemilihan umum. Hal tersebut merupakan sebagian contoh kecil dalam pelaksanaan partisipasi politik masyarakat.

Partisipasi masyarakat dalam contoh lain adalah adanya masyarakat dalam keterlibatannya secara aktif menjalankan program pemerintah. Program pemerintah seperti adanya program pemerintah Desa Mandiri. Program desa mandiri ini merupakan salah satu program yang dicanangkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Adanya desa mandiri ini dapat

mencerminkan sebuah keinginan masyarakat untuk maju dengan adanya karya atau produk yang dapat menunjang kemajuan Desa.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa dalam pembangunan Desa mempunyai 4 aspek yaitu kebutuhan dasar, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa. Desa Mandiri sendiri merupakan sebuah desa yang memiliki ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang mencukupi, infrastruktur yang memadai, aksesibilitas/ transportasi yang mudah, pelayanan umum yang bagus, serta penyelenggaraan pemerintahan sangat baik. Desa Mandiri adalah desa yang memiliki nilai IPD atau Indeks Pembangunan Desa lebih dari 75.

Desa memiliki peranan yang sangat penting dalam pembangunan suatu Negara, baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial maupun budaya. Peranan tersebut dapat dilaksanakan jika desa tersebut dapat menjadi desa yang maju dan sejahtera. Desa sebenarnya memiliki kewenangan tersendiri untuk mengatur kepentingan masyarakatnya. Pemerintah Desa diberikan kebijakan dan kekuasaan tersendiri untuk dapat mengatur dan mengurus desanya supaya menjadi Desa yang maju.

Adanya otonomi desa maka pemerintah Desa dapat menentukan suatu kebijakan yang tepat sesuai dengan karakteristik masyarakatnya sendiri. Hal ini dilaksanakan tentunya untuk mewujudkan yang namanya Desa Mandiri atau kemandirian Desa. Desa mandiri ini bisa diartikan juga sebagai suatu emansipasi Desa. Emansipasi ini pada dasarnya membicarakan persamaan hak setiap desa dan

membicarakan pembebasan dari Dominasi kalangan tertentu. Secara tidak langsung adanya otonomi desa ini tentu mendorong Desa supaya menjadi subjek dalam pemberi manfaat kepada masyarakat, dengan adanya otonomi ini diharapkan juga bahwa Desa bisa memberikan suatu pelayanan sesuai yang diharapkan oleh masyarakatnya.

Desa mandiri juga dapat diartikan bahwa Desa tersebut berdiri tegak tanpa menggantungkan adanya bantuan dari pemerintah. Kalaupun adanya bantuan dari pemerintah tentunya itu hanya menjadi perangsang saja. Sebab dengan terwujudnya Desa Mandiri maka dapat memberikan manfaat kepada masyarakatnya baik dari segi ekonominya, pelayanannya maupun dari segi kebijakannya. Manfaat yang didapatkan dengan adanya desa mandiri maka masyarakat memiliki pendapatan yang cukup dan tidak ada lagi masyarakat yang miskin sehingga terpenuhi segala kebutuhan masyarakat tersebut, mempunyai produk unggulan yang dapat di pasarkan keluar desa sebagai potensi desa, dan desa dapat menjadi lumbung ekonomi.

Desa yang Mandiri memiliki kunci utama, yaitu Pembangunan Desa yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan desa dan kualitas hidup masyarakatnya serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan Desa itu bisa berbentuk fisik ataupun nonfisik dengan

memaksimalkan potensi yang ada di desa dan tidak tergantung pada bantuan pihak luar serta kemampuan masyarakatnya.

Pembangunan sosial, ekonomi, dan ekologi yang berkelanjutan akan membawa menjadi Desa Mandiri. Pembangunan ini sangat perlu diperhatikan dengan mengoptimalkan dan mendayagunakan demi terwujudnya suatu kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan harapan Desa Mandiri. Selain itu, perlu adanya pemberdayaan masyarakat yang sudah diamanatkan dalam Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pemberdayaan yang dapat dilaksanakan seperti mengembangkan kemandirian masyarakat dengan meningkatkan keterampilan, pengetahuan, sikap, kemampuan serta memanfaatkan sumber daya yang tersedia di desa. (UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 ayat 12).

Pembangunan desa mandiri ini tentunya harus mengedepankan gotongroyong, kebersamaan, serta kekeluargaan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial. Pembangunan desa mandiri memang tidak bisa lepas dari adanya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa. sehingga masyarakat harus sadar bahwa dirinya mempunyai hak untuk dapat berpartisipasi karena suatu Desa dapat mandiri jika adanya kesadaran masyarakat akan kebutuhannya. Masyarakat bisa memberikan masukannya atau aspirasinya kepada BPD (Badan Permusyawaratan Desa) mengenai pembangunan yang sangat diperlukan di Desa tersebut supaya dapat di musyawarahkan secara bersama. Sebab BPD mempunyai fungsi

membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. (UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 55).

Pemerintah Desa dalam mempertahankan program Desa Mandiri jika dilihat dari aspek pembangunan desa, maka tidak bisa lepas dari adanya partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat tentu menjadi kunci dalam kemajuan atau kesuksesan program tersebut. Bentuk partisipasi politik dalam mewujudkan adanya desa mandiri bisa dilaksanakan dalam membantu Pemerintah Desa untuk memajukan berbagai sektor, seperti sektor ekonomi, sosial ataupun juga kebudayaan. Sebuah desa yang mempunyai IDP lebih dari 75 tentunya tidak bisa diraih tanpa adanya partisipasi masyarakat. Sehingga hal ini yang menjadi kunci dalam memajukan sebuah Desa.

Strategi yang sudah biasa dipraktekkan untuk membangun kemandirian desa dari sisi internal. Yang Pertama adalah Pembangunan kapasitas masyarakat atau warga dan Ormas yang ada di desa supaya kritis serta dinamis. Kedua, semakin memperkuat kapasitas pemerintah desa dan hubungan yang dinamis antara organisasi warga dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Ketiga, pembangunan sistem perencanaan dan mengalokasikan dana desa yang responsive dan partisipatif. Keempat, pembangunan Lembaga ekonomi di tingkat lokal yang mandiri dan produktif.

Desa Sambonggede merupakan salah satu Desa yang berada di Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban. Desa Sambonggede ini merupakan Desa yang sudah

menjalin kerjasama dengan berbagai Lembaga atau instansi lainnya. Desa Sambonggede pernah menjadi Desa Anti *Money Politik* yang dicanangkan Oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tuban. Selain itu, Desa Sambonggede juga merupakan salah satu Desa yang mendapat penghargaan sebagai Desa yang Inovatif dari Pemerintah Kabupaten Tuban. Sehingga adanya berbagai prestasi yang dimiliki Desa Sambonggede ini maka layak untuk dijadikan sebagai tempat penelitian.

Desa Sambonggede ini pada Tahun 2019 menjadi salah satu Desa percontohan dalam menjadikannya sebagai Desa Mandiri. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa dalam pembangunan desa dapat memenuhi 4 aspek yaitu kebutuhan dasar, pelayanan dasar, lingkungan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa. Desa Mandiri sendiri merupakan desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang mencukupi, infrastruktur yang memadai, aksesibilitas/transportasi yang tidak sulit, pelayanan umum yang bagus, serta penyelenggaraan pemerintahan yang sudah sangat baik. Suatu desa bisa dikatakan sebagai Desa Mandiri jika memiliki nilai Indeks Pembangunan Desa (IPD) lebih dari 75.

Desa Sambonggede dalam aspek pemenuhan Kebutuhan Dasar sudah sebenarnya sudah lama dilakukan. Beberapa kebutuhan dasar yang sudah dilakukan oleh Desa Sambonggede ini menjadi nilai plus dalam mempertahankan Desa Mandiri. Kebutuhan Dasar yang dimaksud adalah kebutuhan pangan, sandang, dan papan. Masyarakat Desa Sambonggede berdasarkan data obeservasi yang dilakukan

oleh peneliti, secara perekonomian 75% masyarakat desa Sambonggede berada di kelas menengah ke atas. Adapun masyarakat yang masih berada di kelas menengah ke bawah, setiap Bulannya diberikan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang merupakan program dari Kementerian Sosial. Sehingga hal ini yang menjadi salah satu aspek untuk meningkatkan kebutuhan dasar masyarakat. Selain itu, pada masa pandemi Covid-19 ini Pemerintah Desa Sambonggede juga memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak demi stabilnya kebutuhan masyarakat desa tersebut.

Selain aspek Kebutuhan Dasar, Desa Sambonggede juga sudah memenuhi aspek pelayanan dasar. Aspek pelayanan dasar ini menjadi salah satu indikator dalam mewujudkan Desa Mandiri. Beberapa indikator dalam mewujudkan pelayanan dasar untuk mewujudkan Desa Mandiri antara lain Penyelenggaraan pendidikan, Pemenuhan fasilitas kesehatan, dan Pembangunan infrastruktur dasar. Berdasarkan dari Indikator tersebut Desa Sambonggede sudah memenuhi semuanya, diantaranya adalah Pengembangan pos kesehatan Desa atau Polindes, Pengelolaan dan pembinaan Posyandu serta Pembinaan dan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Pelayanan dasar yang dilakukan oleh Desa Sambonggede tidak hanya dalam pembangunan fisik saja, namun dalam pelaksanaan operasional pelayanan yang sudah ini juga di *backup* oleh anggaran dana Desa. hal ini dilakukan supaya bisa memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat dalam hal memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut.

Aspek lain yang juga sangat urgent dalam mewujudkan Desa Mandiri adalah aspek lingkungan. Aspek ini meliputi pemanfaatan, perlindungan dan perawatan lingkungan yang berada di Desa sambonggede. Dalam sumberdaya alamnya, Desa Sambonggede mempunyai Waduk Air yang berada di dekat Kantor Desa, mempunyai Pasar Desa sebagai Pusat Perbelanjaan di Kecamatan Merakurak, dan juga memiliki lingkungan persawahan yang cukup luas. Dalam memanfaatkan SDA Desa sambonggede ini, mengembangkan wisata air dan pasar Desa yang dijadikan sebagai salah satu sumber Pendapatan Desa. tidak cukup sampai di situ, Pemerintah Desa Sambonggede juga akan membangun sentra kuliner disekitar Wisata air untuk bisa memberdayakan masyarakat dalam meningkatkan perekonomiannya. Hal ini yang kemudian menjadikan Desa Sambonggede sebagai salah satu percontohan dalam mewujudkan Desa Mandiri. Sehingga pada Tahun 2018 Tim Program Inovasi Desa (TPID) Kecamatan Merakurak memberikan apresiasi kepada Pemerintah Desa Sambonggede.

Aspek yang sangat penting selain dari tiga aspek tersebut adalah aspek Kegiatan pemberdayaan masyarakat desa. aspek pemberdayaan desa ini merupakan salah satu indikator yang *urgent* dalam mewujudkan desa mandiri. Aspek ini diatur dalam UU Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa. Aspek pemberdayaan masyarakat Desa ini dimaksud untuk meningkatkan kegiatan ekonomi dan akses pelayanan terhadap masyarakat. Selain itu juga untuk meningkatkan pelayanan Pendidikan dan kebudayaan di Desa Sambonggede. Beberapa kegiatan yang sudah dilakukan oleh Desa Sambonggede adalah pelayanan penyediaan air bersih, pelayanan kesehatan lingkungan, penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi

balita dan anak sekolah, pengelolaan balai pengobatan Desa, perawatan kesehatan untuk ibu hamil dan menyusui, pengobatan untuk lansia, fasilitasi keluarga berencana, pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas dan kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa lainnya sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

Empat aspek dasar yang sudah diimplementasikan oleh Pemerintah Desa Sambonggede ini tidak bisa dikatakan sukses dalam membangun Desa Mandiri tanpa adanya partisipasi masyarakat. Pada dasarnya partisipasi politik dalam mempertahankan Desa Mandiri ini bisa dilaksanakan secara kelompok atau individu. Partisipasi masyarakat yang sudah dilakukan adalah turut andil dan aktif dalam musyawarah Desa yang digelar oleh Pemerintah Desa. Musyawarah desa dimaksudkan untuk mendengarkan aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan Desa. Beberapa Masukan masyarakat yang sudah direalisasikan oleh Pemerintah Desa Sambonggede adalah pembangunan Wana Wisata Air yang menjadi salah satu jargon Desa Sambonggede dan menjadikan Desa Sambonggede dalam mewujudkan Desa Mandiri.

Masukan tersebut menjadi salah satu indikator pentingnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan Desa. selain itu, dalam pelaksanaan program-program yang dicanangkan oleh pemerintah Desa, masyarakat juga proaktif dalam mengikuti kegiatannya. Semisal dalam hal pelayanan Pendidikan, mayoritas masyarakat Desa Sambonggede mempercayakan anak-anaknya untuk mendapatkan Pendidikan Anak Usia Dini di PAUD milik pemerintah Desa

Sambonggede. Hal lainnya adalah dalam pelayanan posyandu, masyarakat juga aktif dalam mengikuti kegiatan tersebut yang rutin digelar oleh Pemerintah Desa Sambonggede.

Contoh lain pentingnya partisipasi masyarakat adalah dengan adanya Pasar Desa Sambonggede, masyarakat secara aktif berpartisipasi dalam menjual atau membeli kebutuhan pokok kesehariannya. Sehingga hal ini menjadi penompang dalam perputaran perekonomian di Desa Sambonggede. Tidak hanya itu, secara kelompok, adanya Lembaga Swadaya Masyarakat yang proaktif dalam memberikan masukan kepada pemerintah Desa Sambonggede untuk dapat menjadi Desa mandiri. Beberapa kali masukan Lembaga tersebut dilaksanakan oleh pemerintah dan dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Desa.

Partisipasi lain dalam bentuk kelompok adalah adanya Masyarakat yang berbondong-bondong untuk berpartisipasi dalam Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang dibentuk oleh pemerintah desa untuk dapat mengelola beberapa aspek yang sudah dicanangkan oleh pemerintah Desa. Kelompok Desa yang tergabung dalam Bumdes proaktif untuk menjalankan kegiatan-kegiatan yang sudah disepakati antara Kelompok Bumdes dan Pemerintah Desa. Hal ini menjadi salah satu bukti bahwa partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam mewujudkan desa mandiri. Sebab pemerintah Desa sendiri pada dasarnya memiliki Sumberdaya Manusia yang terbatas, SDM yang ada dipemerintahan kadangkala sudah disibukkan dengan banyaknya administrasi yang harus dipenuhi dan banyaknya

laporan harian atau bulanan yang harus dibuat sesuai kebutuhan dari pemerintah Daerah.

Sebagai upaya dalam mempertahankan desa mandiri, maka pemerintah Desa Sambonggede melibatkan masyarakat dalam hal berbagai program yang sudah direncanakan. Sehingga hal ini yang menarik untuk dapat diteliti dan dikaji dalam hal partisipasi masyarakatnya. Sebagaimana kita ketahui segala sesuatu yang berkaitan dengan pemerintahan, maka hal yang dilakukan akan berkaitan erat dengan politik juga. Sehingga dalam tesis ini mengambil judul Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Mempertahankan Desa Mandiri dengan studi kasus di Desa Sambonggede Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban.

1.2 Rumusan Masalah

Melihat dari rumusan masalah yang telah di uraikan di atas, sehingga dalam penelitian ini merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Bentuk Pembangunan Desa Mandiri di Desa Sambonggede Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban?
2. Bagaimana Partisipasi politik masyarakat dalam mempertahankan Desa Mandiri di Desa Sambonggede Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban?
3. Apa implikasi partisipasi politik masyarakat dalam mempertahankan Desa Mandiri di Desa Sambonggede Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari Rumusan Masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui bentuk pembangunan desa mandiri di Desa Sambonggede Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban
2. Mengetahui partisipasi politik masyarakat dalam mempertahankan desa mandiri di Desa Sambonggede Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban
3. Mengetahui implikasi partisipasi politik masyarakat dalam mempertahankan Desa Mandiri di Desa Sambonggede Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua) yaitu secara teoritis dan praktis. Adapun lebih rincinya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini bisa memberikan pengetahuan baru tentang Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Mempertahankan Desa Mandiri (Studi Desa Sambonggede Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban). Penelitian ini juga bisa dimanfaatkan dalam kajian Pembangunan Desa Mandiri. Penelitian ini juga diharapkan bisa menyumbangkan pemikiran teoritis dalam bidang ilmu politik mengenai kajian Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Mempertahankan Desa Mandiri. Selain itu, penelitian ini diharapkan juga bisa dijadikan sebagai rujukan untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini bisa dimanfaatkan oleh Pemerintah Desa seluruh Indonesia dalam pembangunan Desa mandiri. Penelitian ini juga bisa dimanfaatkan oleh Pemerintah Pusat yang dalam hal ini adalah Kementrian PDTT untuk mengetahui Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Mempertahankan Desa Mandiri. Selain itu, Penelitian ini juga bisa dimanfaatkan oleh Pemerintah untuk menjadi rujukan dalam membuat kebijakan serta evaluasi pelaksanaan program pemerintah tentang Desa mandiri.

1.5 Kerangka Konsep

Kerangka konsep dalam penelitian ini adalah Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Mempertahankan Desa Mandiri. Kemudian definisi operasional konsep dalam penelitian ini adalah:

1.5.1 Partisipasi Politik Masyarakat

Partisipasi merupakan turut berperan serta dalam suatu kegiatan atau dapat juga disebut sebagai keikutsertaan atau peran serta dalam suatu kegiatan atau peran serta aktif dalam suatu kegiatan. Kemudian Politik menurut Ramlan Surbakti (1999:1) merupakan interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu. Kemudian untuk partisipasi politik masyarakat adalah kegiatan individu atau kelompok yang turut serta secara aktif dalam kehidupan politik, baik itu dalam bentuk memilih

pemimpin maupun dalam bentuk keikutsertaan dalam menjalankan program pemerintahan.

1.5.2 Desa Mandiri

Desa Mandiri adalah desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang mencukupi, infrastruktur yang memadai, aksesibilitas/transportasi yang tidak sulit, pelayanan umum yang bagus, serta penyelenggaraan pemerintahan yang sudah sangat baik.